

# KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 11 Agustus 2020



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

## **KATA PENGANTAR**

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

## DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Antaranews.com	Senin, 10 Agustus 2020	Kementerian PUPR dukung rencana akses tol ke pasar induk Sidoarjo	<p>Kementerian PUPR mendukung rencana pembangunan akses tol berupa interchange menuju Pasar Induk Puspo Agro di Sidoarjo, Jawa Timur, dan akan melakukan evaluasi yang menjadi bagian dari perubahan ruang lingkup investasi jalan tol.</p> <p><a href="https://www.antaranews.com/berita/1660638/kementerian-pupr-dukung-rencana-akses-tol-ke-pasar-induk-sidoarjo">https://www.antaranews.com/berita/1660638/kementerian-pupr-dukung-rencana-akses-tol-ke-pasar-induk-sidoarjo</a></p> <p><a href="https://www.medcom.id/properti/news-properti/ybDI3j0b-basuki-khofifah-berencana-bangun-akses-tol-pasar-induk-puspo-agro">https://www.medcom.id/properti/news-properti/ybDI3j0b-basuki-khofifah-berencana-bangun-akses-tol-pasar-induk-puspo-agro</a></p> <p><a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/4327429/temui-menteri-pupr-gubernur-jatim-usul-bangun-tol-baru-ke-sidoarjo">https://www.liputan6.com/bisnis/read/4327429/temui-menteri-pupr-gubernur-jatim-usul-bangun-tol-baru-ke-sidoarjo</a></p> <p><a href="https://www.industry.co.id/read/72056/menteri-pupr-gubernur-jatim-sinergikan-rencana-pembangunan-akses-tol-menuju-pasar-induk-puspo-agro-sidoarjo">https://www.industry.co.id/read/72056/menteri-pupr-gubernur-jatim-sinergikan-rencana-pembangunan-akses-tol-menuju-pasar-induk-puspo-agro-sidoarjo</a></p>
2	Antaranews.com	Senin, 10 Agustus 2020	KemenPUPR sebut 141.700 rumah tapak subsidi terjual hingga hari ini	<p>Kementerian PUPR melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) mencatat sebanyak 141.700 unit rumah tapak subsidi telah terjual per Senin (10/8).</p> <p><a href="https://www.antaranews.com/berita/1659546/kemenpupr-sebut-141700-rumah-tapak-subsidi-terjual-hingga-hari-ini">https://www.antaranews.com/berita/1659546/kemenpupr-sebut-141700-rumah-tapak-subsidi-terjual-hingga-hari-ini</a></p>
3	Inews.id	Senin, 10 Agustus 2020	Creative Hub Akan Dibentuk di 5 Destinasi Super Prioritas	<p>Destinasi super prioritas menjadi salah satu andalan pariwisata Indonesia ke depan. Bahkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif segera membentuk creative hub di lima Destinasi Super Prioritas (DSP) dalam kurun waktu setahun ke depan.</p> <p><a href="https://www.inews.id/travel/destinasi/creative-hub-akan-dibentuk-di-5-destinasi-super-prioritas">https://www.inews.id/travel/destinasi/creative-hub-akan-dibentuk-di-5-destinasi-super-prioritas</a></p>
4	Detik.com	Senin, 10 Agustus 2020	Asyik, Bakal Ada Rest Area di Puncak	<p>Pemerintah lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun rest area di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pembangunan rest area ini untuk mendukung jalur pariwisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.</p> <p><a href="https://travel.detik.com/travel-news/d-5127364/asyik-bakal-ada-rest-area-di-puncak?_ga=2.201187374.1688690869.1597112286-741623347.1562140257">https://travel.detik.com/travel-news/d-5127364/asyik-bakal-ada-rest-area-di-puncak?_ga=2.201187374.1688690869.1597112286-741623347.1562140257</a></p>
5	Detik.com	Senin, 10 Agustus 2020	Atasi Kebutuhan Air, 257 Pipa Dipasang Pascabanjir Bandang Masamba	<p>Bencana banjir bandang membuat kebutuhan air baku masyarakat Masamba terganggu lantaran rusaknya pipa transmisi. Kerusakan tersebut diperbaiki.</p> <p><a href="https://news.detik.com/berita/d-5127760/atasi-kebutuhan-air-257-pipa-dipasang-pascabanjir-bandang-masamba?_ga=2.126664717.1688690869.1597112286-741623347.1562140257">https://news.detik.com/berita/d-5127760/atasi-kebutuhan-air-257-pipa-dipasang-pascabanjir-bandang-masamba?_ga=2.126664717.1688690869.1597112286-741623347.1562140257</a></p>
6	Antaranews.com	Senin, 10 Agustus 2020	Labuan Bajo NTT berbenah jelang ASEAN Summit dan KTT G20	<p>Labuan Bajo di NTT terus berbenah meningkatkan kualitas layanan menuju kesiapan diri sebagai tuan rumah ASEAN Summit dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang akan digelar pada 2023.</p>

				<a href="https://www.antaranews.com/berita/1660406/labuan-bajo-ntt-berbenah-jelang-asean-summit-dan-ktt-g20">https://www.antaranews.com/berita/1660406/labuan-bajo-ntt-berbenah-jelang-asean-summit-dan-ktt-g20</a>
7	Bisnis Indonesia, halaman 7	Selasa, 11 Agustus 2020	Target Makin Tak Realistis	Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah (PSR) per 10 Agustus 2020 baru menyentuh 258.252 unit dari target 1 juta unit pada tahun ini.

Judul	Target Makin Tak Realistis	Tanggal	Selasa, 11 Agustus 2020
Media	Bisnis Indonesia, halaman 7		
Resume	Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah (PSR) per 10 Agustus 2020 baru menyentuh 258.252 unit dari target 1 juta unit pada tahun ini.		

| PROGRAM SEJUTA RUMAH |

# TARGET MAKIN TAK REALISTIS

Bisnis, JAKARTA — Realisasi Program Sejuta Rumah masih sangat jauh dari ekspektasi pada 2020. Pemerintah berkeras tidak merevisi target, kendati menyadari tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan program tersebut di tengah pandemi.

Yanita Petriella  
yanita.petriella@bisnis.com

**M**engutip data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pembangunan hunian dalam Program Sejuta Rumah (PSR) per 10 Agustus 2020 baru menyentuh 258.252 unit dari target 1 juta unit pada tahun ini.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menjabarkan capaian PSR yang selama 2015—2019 menunjukkan tren positif. (*Lihat grafis*). Dia pun mengakui realisasi program tersebut pada tahun ini terganjal kendala yang cukup berat, tetapi kementerian tidak akan merevisi target PSR. "Setiap tahun targetnya memang 1 juta rumah, tetapi karena pandemi ini mungkin akan menjadi kendala. Namun, kami masih punya waktu, makanya kami tetap optimalkan," ucap Khalawi saat dihubungi, Senin (10/8).

Adapun, lanjutnya, kendala pelaksanaan PSR saat ini terutama disebabkan oleh adanya *refocusing* dan realokasi anggaran kementerian/lembaga, termasuk anggaran perumahan di lingkungan Kementerian PUPR.

Selain itu, kata Khalawi, PSR terkendala oleh perlambatan proses pembangunan perumahan akibat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan jarak sosial dan fisik, serta imbauan bekerja dari rumah atau *work from home* (WFH). "Saat ini bagi MBR [masyarakat berpenghasilan rendah], perumahan bukanlah prioritas utama lantaran berkurangnya penghasilan pada era pandemi Covid-19, kredit macet baik

dari pihak pengembang maupun MBR, dan lain-lainnya," tuturnya. Selain itu, anjaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II/2020 turut memengaruhi penurunan daya beli MBR dan kemampuan menyuplai rumah bagi masyarakat oleh para pemangku kepentingan industri properti.

Ke depan, dalam rangka menghadapi proyeksi penyelenggaraan perumahan era adaptasi kebiasaan baru, pemerintah akan terus berusaha menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat dengan mengedepankan program kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) serta program inovasi lainnya.

"Kami berusaha optimalkan dan yang penting tetap semangat membangun rumah MBR. Persentase capaian PSR masih diprioritaskan untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah yakni 79%," kata Khalawi.

Menurutnya, kementerian akan mendorong sejumlah program padat karya di sektor perumahan melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi rumah bersubsidi agar dapat memacu pergerakan perekonomian dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sekadar catatan, berdasarkan data Kementerian PUPR, *backlog* perumahan mencapai 7,64 juta unit rumah per awal 2020 yang terdiri dari 6,48 juta unit rumah

untuk MBR berpenghasilan tidak tetap, 1,72 juta unit rumah untuk MBR berpenghasilan tetap, dan 0,56 juta unit rumah untuk non-MBR.

Lalu, *backlog* perumahan juga terjadi pada rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 2,36 juta unit, yang terdiri dari rumah terdiri atas *backlog* RTLH 2015 dan RTLH 2015—2019.

Adapun, target RPJMN dan Renstra Kementerian PUPR 2020—2024 mencakup intervensi langsung pemerintah mencapai 5 juta yang terdiri SMF sebanyak 50.000 unit, subsidi BP2BT sebanyak 100.000 unit, Tapera sebanyak 500.000 unit, subsidi perumahan FLPP/SSB-SBUM sebanyak 900.000 unit, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat sebanyak 3,45 juta unit.

## CAPAI SETENGAH

Di tempat terpisah, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan dengan kondisi masih di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman resesi ekonomi, realisasi PSR tahun ini diproyeksi hanya sanggup mencapai maksimal 50% dari target.

"Target realistis hanya 50% hingga akhir tahun," ujarnya.

Menurut Nirwono, pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR harus memastikan terlebih dahulu bahwa PSR memang masih menjadi program prioritas pemerintah saat ini.

Tujuannya adalah untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan segala turunannya.

"Pembangunan rumah juga ha-



**Perlu ada relaksasi agar PSR dapat tercapai.**

rus menjamin ketepatan sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama utamanya MBR, para pekerja, dan generasi milenial kota," tutur Nirwono

Di sisi lain, para pengembang menuntut relaksasi sejumlah aturan agar dapat merangsang realisasi PSR.

Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan saat ini persyaratan untuk membeli rumah segmen MBR sangat ketat.

"Kalau sekarang persyaratan untuk dapat KPR cukup ketat. Ini menjadi problem berdampak pada pembangunan sejuta rumah," ujarnya.

Dia mengakui realisasi PSR bakal sangat berat. Pasalnya, pemerintah meminta agar listrik dari PT PLN (Persero) sudah terpasang dan pembangunan jalan di area rumah sudah selesai. Lalu, dari sisi pembeli, ada persyaratan penghasilan maksimal Rp8 juta untuk dapat membeli

rumah MBR.

"Di Solo, gaji pokok Rp1,5 juta plus tunjangan-tunjangan yang cukup besar. Di Papua, gaji Rp8 juta sangat kecil karena biaya hidup yang mahal. Ini yang membuat hambatan selama ini," katanya.

Untuk itu, Paulus menyarankan pemerintah memperlonggar aturan tersebut dari ketentuan minimum *take home pay* menjadi gaji pokok karena mempertimbangkan UMP yang bisa dinaikkan lagi batas maksimalnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah pun mengatakan PSR dapat berjalan dengan baik jika mendapat dukungan seluruh pihak.

Para pengembang berharap pemerintah menyederhanakan syarat-syarat kepemilikan rumah, keringanan suku bunga kredit konstruksi, serta restrukturisasi pembayaran cicilan pokok dan bunga.

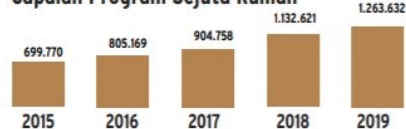
"Perlu ada relaksasi agar PSR dapat tercapai. Penerapan aturan yang sangat ketat di tengah pandemi juga ikut berdampak pada penurunan permintaan hunian. Kami optimistis dapat menyediakan rumah yang layak huni karena rumah masih menjadi kebutuhan bagi MBR," tuturnya.

Bagaimanapun, pihaknya belum mengetahui secara pasti berapa banyak rumah yang berhasil dibangun hingga akhir tahun ini dalam rangka PSR. Tahun ini, asosiasi ditargetkan dapat membangun 100.000 unit rumah.

"Sulit tercapai di tengah kondisi seperti ini, belum lagi aturan yang ketat dan sulit membuat kami berat untuk melaju," ujar Junaidi. □

## RUMAH UNTUK RAKYAT

### Capaian Program Sejuta Rumah



Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah menargetkan realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) benar-benar dapat mencapai 1 juta unit pada tahun ini. Bagaimana strategi pemerintah dan pengembang untuk mewujudkan hal itu di tengah arus kas industri yang sedang seret?

### Kemampuan Pembiayaan Rumah

PSR 2015—2019	
Pemerintah pusat	: 34,67%
Pemerintah daerah	: 8,80%
Pengembang	: 51,89%
Masyarakat	: 4,64%
Backlog Kepemilikan PSR 2015—2019	: 32,98%
Backlog RTLH PSR 2015—2019	: 30,58%

### Defisit Perumahan di Indonesia

#### Backlog Kepemilikan Rumah 2015

MBR berpendapatan tidak tetap	: 6,83 juta
MBR berpendapatan tetap	: 3,76 juta
Non-MBR	: 0,81 juta
Total	: 11,40 juta

#### Program Sejuta Rumah (PSR) 2015—2019

MBR berpendapatan tidak tetap	: 0,35 juta
MBR berpendapatan tetap	: 2,04 juta
Non-MBR	: 1,37 juta
Total	: 3,76 juta

#### Defisit Kepemilikan Rumah Awal 2020

MBR berpendapatan tidak tetap	: 6,48 juta
MBR berpendapatan tetap	: 1,72 juta
Non-MBR	: surplus 0,56 juta
Total	: 7,64 juta

#### Defisit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Awal 2020

Total	: 2,36 juta
-------	-------------